



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

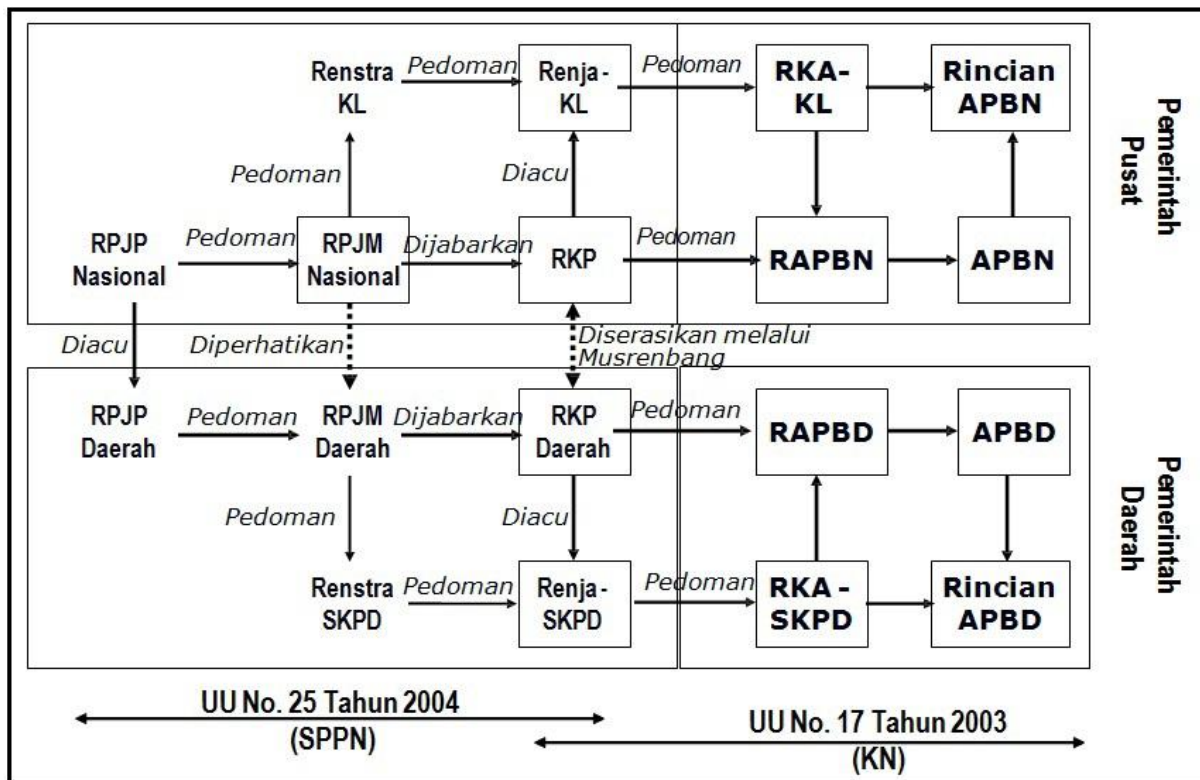
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V.	PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024,
2. evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.18	PENANAMAN MODAL									
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	85	85,02	85	85,43*)	100.50 %	85	85	100%
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100%	100%	100%	100%	99,06%	100%	100%	100%
2 18 01 2.01 01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	-	12	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
2 18 01 2.01 06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset	-	12	-	-	-	-	-	-
		Laporan capaian kinerja	-	12	-	-	-	-	-	-
		Laporan kepegawaian	-	12			-	-	-	-
		Laporan keuangan	-	12	12	12	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	-	-	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.01 07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	8	4	4	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2 18 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
2 18 01 2.02 01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji		14			-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	29	32	32	100%	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	100%
2 18 01 2.02 02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4	4	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.18.01. 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01 2.05 11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	60	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
		meningkat sebanyak 100% dari 60 orang								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	60	60	60	100%	60 orang	60 orang	100%
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01 2.06 01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	-	12	-		-	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1	1	1	100%	1 paket	1 paket	100%
2 18 01 2.06 02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	-	10	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	20	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	12	2	2	100%	2 paket	2 paket	100%
2 18 01 2.06 03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	-	10	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	25	2	2	100%	2 paket	2 paket	100%
2 18 01	Subkegiatan Penyediaan	Barang cetakan	-	14	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
2.06 05	Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	-	93.766	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	7	5	5	100%	5 paket	5 paket	100%
2 18 01 2.06 06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	-	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	6	6	6	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
2 18 01 2.06 08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.06 09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	-	18	-		-	-	-	-
		Penerimaan tamu	-	240	-		-	-	-	-
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	557	-		-	-	-	-
		Perjalanan dinas luar daerah	-	24	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.06 10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5	5	5	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
2 18 01 2.06 11	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	7	7	7	7	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
	Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
2 18 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
2 18 01 2.08 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	-	219	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.08 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	-	12	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.08 03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	-	57	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.08 04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	-	12	-	-	-	-	-	-
		Laporan keamanan kantor	-	12	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
		Laporan kebersihan kantor	-	12	-	-	-	-	-	-
		Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	-	12	-	-	-	-	-	-
		Pengelola keuangan dan BMD	-	120	-	-	-	-	-	-
		Tim penyedia barang dan jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100		100	100%	100%	100%	100%
2 18 01 2.09 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua	-	7	-	-	-	-	-	-
		Kendaraan dinas roda empat	-	7	-	-	-	-	-	-
		Pajak kendaraan dinas roda dua	-	7	-	-	-	-	-	-
		Pajak kendaraan dinas roda empat	-	7	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	14	14	100%	14 unit	14 unit	100%
2 18 01	Subkegiatan	Pemeliharaan	-	200	-		-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122	122	122	122	100%	122 unit	122 unit	100%
2 18 01 2.09 09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	-	1	-	-	-	-	-	-
		Rehabilitasi gedung kantor	-	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1 unit	1 unit	100%
2 18 01 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01 2.13 04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu	-	12	-		-	-	-	-
		Laporan pelaksanaan pendampingan	-	10	-	-	-	-	-	-
		Sertifikasi ISO 9001:2015	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	12	12	12	12	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
		Publik dan Tata Laksana								
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100	100		100	100%	100%	100%	100%
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1	1		1	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.01.0001	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	-
		SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal -	1	1	1	1	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.01.02	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif	4	1.918	-	-	1-	-	-	-

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Daerah								
2.18.03. 2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan Strategi Promosi	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2	1	2	2	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.18.03. 2.01.02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan pameran penanaman modal	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	1	2	2	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100	100		100	100%	100%	100%	100%
2.18.04. 2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3000	2784	3000	3867	128,9%	3000 legalitas	3000 legalitas	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
	Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
2.18.04. 2.01.00 05	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	12	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	4 dokumen	4dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.18.04. 2.01.00 06	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin terbit	-	3.744	-	-	-	-	-	-
		Standar Pelayanan	-	1	-		-	-	-	-
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1600	2.732	1.700	2747	161,6%	1800 pelaku usaha	1800 pelaku usaha	100%
2.18.04. 2.01.00 07	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	-	12	-	-	-	-	-	-
		Laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan	700	2.000	800	1857	218	850 orang	850 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
	Perizinan	Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan								
2.18.04.2.01.0008	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	2.000	3607	180,35	-	-	-
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8	0	8	62	>100%	8 perusahaan	8 perusahaan	100%
2.18.05.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	-	119 dokumen LKPM	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
2.18.05.2.01.00 04	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	-	-	8	62	98,91%	120 Kegiatan usaha	126 Kegiatan usaha	108%
2.18.05.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	-	232 Perusahaan PMA dan PMDN	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01.00 05	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	238	790	>100%	238 pelaku usaha	238 pelaku usaha	100%
2.18.05.2.01.00 06	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan	-	55 Perusahaan PMA dan PMDN	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan	-	-	28	66	>100%	28 kegiatan usaha	28 kegiatan usaha	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
		Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	100	100		100	100%	100%	100%	100%
2.18.06. 2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	2	0	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%
2.18.06. 2.01.01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan aplikasi dan database	-	1	-	-	-	-	-	-
		Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	2	2	2	2	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
		Dimanfaatkan								
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA di Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan		-	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Legalitas usaha bagi UMKM atau terbitnya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	330	720 pelaku usaha	720 pelaku usaha	100%	800 pelaku usaha	800 pelaku usaha	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
NIHIL		
*Seluruh Program / Kegiatan / Sub Kegiatan memenuhi target kinerja yang direncanakan		

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Upaya konsisten melaksanakan program sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Upaya penyusunan dokumen perencanaan sesuai NSPK
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Kerjasama yang intens baik internal maupun eksternal
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan dengan stakeholder terkait
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Penyediaan	Koordinasi internal yang baik

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Lainnya	memenuhi standar
	Kegiatan Penataan Organisasi	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Partisipasi aktif tim manajemen mutu ISO 9001:2015
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Partisipasi aktif pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i> terkait
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
3	Program Promosi Penanaman Modal	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya Koordinasi dan Kerjasama dengan <i>stakeholder</i>
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Promosi yang cukup memadai
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi (Gampil/Gerakan Melayani Perizinan Langsung)
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terbentuknya Tim Manajemen Komplain yang efektif
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi internal yang baik dalam mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan
5	Program Pengendalian Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan OPD terkait
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan OPD terkait
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi (Geplak/Gerakan Pendampingan Penyusunan LKPM)
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Database, sarana dan prasarana yang memadai serta kerjasama tim personil yang baik
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terbentuknya Tim Pengawasan yang efektif
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Koordinasi dan Kerjasama yang intens baik internal maupun eksternal
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Koordinasi dan Kerjasama yang intens baik internal maupun eksternal
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Kerjasama yang intens baik internal maupun eksternal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi maupun kaitannya dengan Standar Perizinan Berusaha yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha pada masing-masing sektor;
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyelenggara pelayanan perizinan;
3. Menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, perlunya terus menjaga komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa yang sebenarnya diharapkan dalam pelayanan;
4. Merumuskan strategi pelayanan perizinan dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Artinya bahwa hal-hal yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat;
5. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;;
7. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
8. Mengoptimalkan pengendalian (pengawasan, pembinaan dan pemantauan) pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;

9. Mengoptimalkan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;
10. Menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	IKU lama	v	v	v	v	v	
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.193.856.422.696,05	2.881.147.742.696,05	3.608.270.501.500,05	3.965.123.195.297,05	
2	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	87	88,84	87,11	88	
	IKU Baru	v	v	v	v	v	v
1	Pertumbuhan nilai investasi	persen	28,49*)	31,33*)	25,24*)	11,78	11,79
2	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	persen	100**)	100**)	100**)	99	99,10

Keterangan : *) dengan dukungan DAK

***) sumber data dari izinonline.bantulkab.go.id

Sesuai pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Nilai Realisasi Investasi
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya Inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi OPD;
- Dukungan sumber daya anggaran selain APBD;
- Optimalisasi kolaborasi *stakeholder*;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan Fasilitas Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah;
3. Menyenggarakan Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
4. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;
5. Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal;
6. Menyenggarakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
7. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;

8. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
9. Mengoptimalkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
10. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
11. Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten;
12. Mengoptimalkan Penyelenggaraan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
13. Melaksanakan rangkaian inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan
Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Komitmen dan sinergitas OPD yang tergabung dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal
Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama/IKU Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan untuk optimalisasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan;
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan birokrasi ;
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal;
2. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi PenanamanModal;
3. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
4. Meningkatkan promosi investasi;
5. Mengoptimalkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Mengimplementasikan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				14.398.117.256	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.042.588.736	
2.18 .01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	12.523.604.256	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	83,90	6.329.101.404	
							DPMPTSP Kab. Bantul	IKM	88,11		
2.18 .01. 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan	100%	152.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan	100%	16.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul					Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul			
2.18 .01. 2.01 .01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	118.000.000	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.000.000	
2.18 .01. 2.01 .06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	17.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	4.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Realisasi Kinerja SKPD					Realisasi Kinerja SKPD			
2.18 .01. 2.01 .07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.000.000	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.600.000	
2.18 .01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	5.098.435.128	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	4.980.070.730	
2.18 .01. 2.02 .01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	5.014.335.128	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	4.911.310.730	
2.18 .01. 2.02 .02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN	4 Dokume n	84.100. 000	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN	4 Dokumen	68.760.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .01. 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	475.200.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	34.319.600	
2.18 .01. 2.05 .11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	300 Orang	475.200.000	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	80 Orang	34.319.600	
2.18 .01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	3.425.400.200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	597.841.722	
2.18 .01. 2.06 .01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	489.424.600	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	9.541.860	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Disediaka n					yang Disediaka n			
2.18 .01. 2.06 .02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	5 Paket	1.000.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	5 Paket	226.203.780	
2.18 .01. 2.06 .03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	2 Paket	450.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	2 Paket	39.608.292	
2.18 .01. 2.06 .05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediakan	5 Paket	482.703.600	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediakan	5 Paket	78.161.790	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .01. 2.06 .06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g Undangan yang D	6 Dokume n	6.600.000	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g Undangan yang D	6 Dokumen	6.600.000	
2.18 .01. 2.06 .08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tam	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu	12 Laporan	16.672.000	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tam	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu	12 Laporan	36.245.000	
2.18 .01. 2.06 .09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	980.000 .000	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	187.954.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .01. 2.06 .10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	23.000.000	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	6.227.000	
2.18 .01. 2.06 .11	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	23.000.000	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	7.300.000	
2.18 .01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	668.603.798	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	259.576.052	
2.18 .01. 2.08 .01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa	12 Laporan	2.190.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa	12 Laporan	2.184.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Surat Menyurat					Surat Menyurat			
2.18 .01. 2.08 .02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Laporan	33.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Laporan	20.000.000	
2.18 .01. 2.08 .03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	90.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	30.105.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .01. 2.08 .04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	543.413.798	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	207.287.052	
2.18 .01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.503.965.130	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	324.193.300	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .01. 2.09 .02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya	14 Unit	600.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya	14 Unit	152.951.450	
2.18 .01. 2.09 .06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	500.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	42.831.850	
2.18 .01. 2.09 .09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1.403.965.130	Subkegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	128.410.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dipelihara /Direhabilitasi					Dipelihara /Direhabilitasi			
2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	200.000.000	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	117.000.000	
2.18.01.2.13.04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	200.000.000	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	117.000.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman	100%	236.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	DPMPTSP Kab. Bantul	Proyek baru di tahun n	433 proyek	36.310.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	MODAL		Modal			MODAL					
2.18 .02. 2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ ko	1 Dokume n	128.500.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ ko	1 Dokumen	26.110.000	
2.18 .02. 2.01 .000 1	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah/Pr ovinsi dalam Pemberian Fasilitas/I nsentif dan Kemudah an Penanama n Modal	1 Dokume n	86.500.000	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah/Pr ovinsi dalam Pemberian Fasilitas/I nsentif dan Kemudah an Penanama n Modal	1 Dokumen	14.960.000	
2.18 .02. 2.01 .000 3	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	4 Kegiatan Usaha	42.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	1 Dokumen	11.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah					(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			
2.18 .02. 2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	108.000.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	10.200.000	
2.18 .02. 2.02 .000 1	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	56.500.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.100.000	
2.18 .02. 2.02 .000 4	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peta Potensi Investasi dan	1 Dokumen	51.500.000	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peta Potensi Investasi dan	1 Dokumen	5.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Peluang Usaha Kabupaten/Kota					Peluang Usaha Kabupaten/Kota			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	17,79%	473.038.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	peminat investasi	3 peminat	167.312.536	
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	473.038.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	167.312.536	
2.18.03.2.01.0002	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	318.538.000	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	161.312.536	
2.18.03.2.01.0003	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur	2 dokumen	154.500.000	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur	2 dokumen	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota					Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	417.610.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	93,3%	318.229.924	
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3000 Legalitas	417.610.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3000 Legalitas	318.229.924	
2.18.04.2.01.0005	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan	4 Kegiatan Usaha	30.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan	4 Dokumen	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			n Koordinasi dan Sinkronis asi Penetapan Pemberian Fasilitas/I nsentif Daerah					n Koordinasi dan Sinkronis asi Penetapan Pemberian Fasilitas/I nsentif Daerah			
2.18 .04. 2.01 .000 6	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat kan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si Secara Elektronik	1.900 Pelaku Usaha	65.000.000	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat kan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si Secara Elektronik	1.900 Pelaku Usaha	194.962.816	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .04. 2.01 .000 7	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Memperol eh Layanan Konsultasi dan Terkelolan ya Pengadua n Masyarak at Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan	900 Orang	287.210.000	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Memperol eh Layanan Konsultasi dan Terkelolan ya Pengadua n Masyarak at Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan	900 Pelaku Usaha	17.929.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .04. 2.01 .000 8	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2200 Kegiatan Usaha	35.400.000	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2200 Kegiatan Usaha	99.337.308	
2.18 .05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	430.237.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	475,52 milyar	72.877.436	
2.18 .05. 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 Perusahaan	430.237.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 Perusahaan	72.877.436	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18 .05. 2.01 .000 4	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	124 Kegiatan Usaha	142.229 .000	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	124 Kegiatan Usaha	10.625.000	
2.18 .05. 2.01 .000 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 Pelaku Usaha	220.090.500	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 Pelaku Usaha	24.540.000	
2.18 .05.	Subkegiatan Koordinasi dan	DPMPTSP Kab.	Jumlah Kegiatan Usaha dari	30 Kegiatan	67.917.500	Subkegiatan Pengawasan	DPMPTSP Kab.	Jumlah Kegiatan Usaha dari	30 Kegiatan	37.712.436	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.01 .000 6	Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bantul	Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Usaha		Penanaman Modal	Bantul	Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Usaha		
2.18 .06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	117.128.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	118.757.436	
2.18 .06. 2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada	DPMPTSP Kab. Bantul	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 Jenis Database	117.128.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	DPMPTSP Kab. Bantul	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	3 Jenis Data	118.757.436	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
2.18 .06. 2.01 .002	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaat kan	2 Dokume n	117.128.000	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaat kan	2 Dokumen	118.757.436	
4.01 .04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupate n Bantul			200.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Bantul			181.507.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01 .04. 5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 inovasi	181.507.000	
4.01 .04. 5.02 .000 1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 inovasi	200.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 inovasi	181.507.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Panjangrejo Pundong	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1 paket (30 pelaku usaha)	Bimtek Pendampingan penerbitan legalitas usaha/NIB bagi pelaku usaha

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Terintegrasi secara Elektronik		Elektronik		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melalui penyelenggaraan urusan pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan adalah penyediaan kegiatan layanan publik yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun pemohon izin yang merupakan fasilitasi non fisik.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi
2. Meningkatkan promosi investasi
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP
5. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

- (2) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- (3) Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- (4) Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- (5) Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi	persen	25,24*)	11,78	11,79
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	persen	100**)	99	99,10

Keterangan : *) dengan dukungan DAK

**) sumber data dari *izinonline.bantulkab.go.id*

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						7.224.095.736,00						14.198.117.256,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.042.588.736,00								14.198.117.256,00				
	2	1 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7.042.588.736,00								14.198.117.256,00				
1	2	1 8	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-			83.90 nilai 88.11 angka	6.329.101.404,00						-	12.523.604.256,00					
	2	1 8	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	-		100 persen	100 persen	16.100.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul	-	152.000.000,00					
	2	1 8	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		118.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	1 8	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	1 8	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		4 Laporan	2.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
		2	1 8	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	-	100 persen	100 persen	4.980.070.730,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPTSP Kabupate n Bantul	-	5.052.435.128,00				
		2	1 8	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bul an		35 Orang/bulan	4.911.310.730,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPTSP Kabupate n Bantul		4.968.335.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
		2	1 8	0 1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 dokumen		4 Dokumen	68.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPTSP Kabupate n Bantul		84.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
		2	1 8	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	100 persen	100 persen	34.319.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPTSP Kabupate n Bantul	-	475.200.000,00				
		2	1 8	0 1	2.0 5	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang		80 Orang	34.319.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMP TSP Kabupaten Bantul		475.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-	100 persen		100 persen	597.841.722,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	3.471.400.200,00					
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 paket		2 Paket	9.541.860,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		489.424.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket		5 Paket	226.203.780,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 paket		2 Paket	39.608.292,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Bantul		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	78.161.790,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarak at Kabupate n Bantul		482.703.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 dokumen		6 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		6.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan		12 Laporan	36.245.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		16.672.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		12 Laporan	187.954.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		980.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	1 8	0 1	2.0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5 Dokumen			5 Dokumen	6.227.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		7 Dokumen			7 Dokumen	7.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 persen		100 persen	259.576.052,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul	-	668.603.798,00		
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan		12 Laporan	2.184.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan	30.105.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan	207.287.052,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		543.413.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 persen		100 persen	324.193.300,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul	-	2.503.965.130,00		
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit		14 Unit	152.951.450,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarak at Kabupate n Bantul		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		122 Unit		122 Unit	42.831.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat at Kabupaten Bantul		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit	128.410.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat at Kabupaten Bantul		1.403.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.13		Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	-	100 persen		100 persen	117.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat at Kabupaten Bantul	-	200.000.000,00					
	2	18	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		12 Dokumen		12 Dokumen	117.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat at Kabupaten Bantul		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Proyek baru di tahun n	-	-		433 proyek	36.310.000,00						-	236.500.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	-		1 dokumen	26.110.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	-	128.500.000,00					
		2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
								Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen		1 Dokumen	14.960.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		86.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
		2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		1 Dokumen		1 Dokumen	11.150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
		2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	-		2 peta potensi	10.200.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	-	108.000.000,00					
		2	18	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		56.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		51.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	peminat investasi	-	-		3 peminat	167.312.536,00						-	473.038.000,00	
		2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	-	100 persen		100 persen	167.312.536,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	-	473.038.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		2 Dokumen		2 Dokumen	161.312.536,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		318.538.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		2 Dokumen		2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		154.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kesesuaian SOP perizinan	-	92,8 persen		93.3 persen	318.229.924,00						-	417.610.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	3867 legalitas		3000 legalitas	318.229.924,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	417.610.000,00				
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		4 dokumen		4 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		2747 Pelaku Usaha		1900 Pelaku Usaha	194.962.816,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1857 Pelaku Usaha		900 Pelaku Usaha	17.929.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		287.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		3607 Kegiatan Usaha		2200 Kegiatan Usaha	99.337.308,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat at Kabupaten Bantul		35.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	-	727.12 Milyar		475.52 milyar	72.877.436,00					-	430.237.000,00		
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	-	62 perusahaan		8 perusahaan	72.877.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	-	430.237.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya														
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya		62 Kegiatan Usaha		124 Kegiatan Usaha.	10.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		142.229.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		790 Pelaku Usaha		240 Pelaku Usaha	24.540.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		220.090.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		66 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	37.712.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		67.917.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	100 persen		100 persen	118.757.436,00						-	117.128.000,00		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	-	2 database		3 jenis data	118.757.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	117.128.000,00		
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		2 Dokumen		2 Dokumen	118.757.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						181.507.000,00							0,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						181.507.000,00								0,00	
7	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	-	100 persen		100 persen	181.507.000,00						-	150.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	100 persen		100 persen	181.507.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	-	150.000.000				
	4	01	04	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		1 dokumen		1 Dokumen	181.507.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha		150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	J U M L A H											7.224.095.736,00								14.198.117.256,00		

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

